

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (*Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad* 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tahun Anggaran berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam suatu tahun anggaran mencakup:
 - a. pendapatan negara yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. belanja negara yaitu semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun anggaran bersangkutan;
 - c. defisit belanja negara yaitu selisih kurang antara pendapatan negara dengan belanja negara;
 - d. pembiayaan defisit yaitu semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja negara yang bersumber dari pembiayaan dalam dan luar negeri;
 - e. surplus pendapatan negara yaitu selisih lebih antara pendapatan negara dengan belanja negara.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening Kas Negara pada bank sentral dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang dirinci lebih lanjut ke dalam bagian anggaran dengan Keputusan Presiden.
- (2) Bagian anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. anggaran pendapatan dirinci ke dalam unit organisasi dan jenis pendapatan;
 - b. anggaran belanja dirinci ke dalam unit organisasi, kegiatan/ proyek dan jenis belanja.

Pasal 4

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengatur penyediaan uang dan penyaluran dana untuk membiayai anggaran belanja negara sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

- (1) Menteri/pimpinan lembaga yang menguasai bagian anggaran mempunyai kewenangan otorisasi dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran di lingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, departemen/lembaga membuat dokumen anggaran berupa surat keputusan otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- (3) Dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO antara lain untuk :
 - a. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin dimuat dalam daftar isian kegiatan (DIK);
 - b. pelaksanaan belanja pembangunan dimuat dalam daftar isian proyek (DIP).
- (4) Menteri/pimpinan lembaga pada setiap awal tahun anggaran menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai :
 - a. penandatanganan SKO;
 - b. atasan langsung bendaharawan;
 - c. bendaharawan.
- (5) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat (4) dilarang merangkap jabatan dimaksud.

Pasal 6

- (1) Menteri Keuangan mempunyai kewenangan otorisasi atas penguasaan bagian anggaran diluar bagian anggaran departemen/ lembaga.
- (2) Tata cara pengelolaan bagian anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Pendapatan negara pada departemen/lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara.
- (2) Pendapatan negara dibukukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara.

Pasal 8

- (1) Departemen/lembaga wajib :
 - a. mengadakan intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
 - b. mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara;
 - c. melakukan penuntutan dan pemungutan ganti rugi atas kerugian negara;
 - d. mengintensifkan pemungutan sewa penggunaan barang-barang milik negara;
 - e. melakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan;
 - f. mengenakan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang negara tersebut di atas.

- (2) Pemerintah daerah membantu pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

- (1) Barang tidak bergerak milik negara yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi secara optimal dan efisien untuk menunjang tugas pokok dan fungsi departemen/lembaga, dapat dimanfaatkan dengan cara dipinjamkan, disewakan, bangun guna serah dan kerjasama pemanfaatan atau dapat dihapus dengan tindak lanjut dijual, dipertukarkan, dihibahkan, dijadikan penyertaan modal negara dan dimusnahkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan persetujuan tertulis dari Presiden atas usul Menteri Keuangan;
 - b. untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
- (2) Barang bergerak milik negara yang berlebih atau tidak dapat dipergunakan lagi hanya dapat dihapus dengan cara dimusnah-kan/dipindahtangankan dengan keputusan menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan, kecuali kendaraan bermotor dan atau barang yang bernilai ekonomis tinggi terlebih dahulu dengan persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
- (3) Dalam hal barang-barang yang karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dikuasai oleh negara atau menjadi milik negara tidak dapat dimanfaatkan dan tidak laku dijual, dapat dimusnahkan dengan persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
- (4) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pemusnahan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung oleh negara.
- (5) Menteri Keuangan dapat menunjuk departemen/lembaga untuk memanfaatkan barang-barang yang dikuasai oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila departemen/lembaga akan menjual/memindahtangankan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
- (7) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (5), dan (6) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (8) Penjualan barang milik negara dilakukan melalui Kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang milik negara yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (9) Hasil penjualan, selisih tukar menukar, penyewaan, bangun guna serah dan kerjasama pemanfaatan barang milik negara merupakan pendapatan negara yang harus disetor seluruhnya ke Rekening Kas Negara.
- (10) Pinjam meminjam barang milik negara hanya dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.
- (2) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara.
- (3) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara.
- (4) Dalam penyediaan anggaran belanja negara diutamakan untuk penyediaan belanja operasional dan pemeliharaan atas barang milik negara.

Pasal 11

- (1) Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan pada SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- (2) SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dananya bersumber dari dalam negeri dan atau luar negeri berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO merupakan dasar pencairan dana oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/ pemerintah daerah;
 - c. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.
- (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- (3) Tata cara pengeluaran dan pembayaran dalam pelaksanaan anggaran belanja negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 13

- (1) Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan :
 - a. perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/ lembaga/pemerintah daerah;
 - b. pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa;
 - c. pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada departemen/lembaga/ pemerintah daerah;
 - d. pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut di atas.
- (2) Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan belanja negara dilakukan standardisasi komponen kegiatan termasuk harga satuannya.
- (2) Standardisasi harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam dokumen anggaran.
- (3) Dalam penyusunan standardisasi harga satuan, sedapat mungkin menggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitan resmi Badan Pusat Statistik, departemen/lembaga, dan pemerintah daerah.
- (4) Penetapan standardisasi perlu dilakukan secara berkala oleh :
 - a. Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri/pimpinan lembaga terkait untuk standardisasi harga satuan umum, satuan biaya langsung personil dan non personil untuk kegiatan jasa konsultasi;
 - b. Menteri/pimpinan lembaga untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan departemen/lembaga yang bersangkutan;
 - c. Gubernur/bupati/walikota dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuan bangunan gedung negara untuk keperluan dinas seperti kantor, rumah dinas, gudang, gedung rumah sakit, gedung sekolah, pagar dan bangunan fisik lainnya.

Pasal 15

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBN diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 16

- (1) Perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar negeri untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran tidak memerlukan persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagian maupun seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar negeri untuk masa pelaksanaan pekerjaan melebihi 1 (satu) tahun anggaran, maka di dalam perjanjian/kontrak tersebut harus mencantumkan tahun anggaran pembebanan dana.
- (4) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat diubah dalam bentuk rupiah dan sebaliknya kontrak dalam bentuk rupiah tidak dapat diubah dalam bentuk valuta asing.
- (5) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah mumi.
- (6) Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang dan jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing.
- (7) Perjanjian/kontrak dengan dana kredit ekspor yang sudah ditandatangani tidak dapat dilaksanakan apabila naskah perjanjian pinjaman luar negeri (NPPLN) belum ditandatangani.
- (8) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (4), (5) dan (6) harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Pasal 17

- (1) Departemen/lembaga menetapkan kebijakan untuk mengintensif-kan pelaksanaan pungutan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.
- (2) Departemen/lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang dan atau peraturan pemerintah.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, departemen/ lembaga, pemerintah daerah, kantor/ satuan kerja, proyek/bagian proyek dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyampaikan bahan-bahan keterangan untuk keperluan perpajakan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/ anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Menteri/pimpinan departemen/lembaga berkewajiban mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak meliputi sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.
- (2) Atas pemanfaatan barang milik negara oleh pihak ketiga wajib dipungut sewa.
- (3) Menteri/pimpinan lembaga berkewajiban mengintensifkan penerimaan sewa barang milik negara yang dipergunakan oleh pihak ketiga.

- (4) Penghuni rumah negara dikenakan pembayaran sewa.
- (5) Besaran tarif dan prosedur pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 20

- (1) Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah, atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala wajib menyetor/ melimpahkan seluruh penerimaan negara yang telah dipungutnya ke rekening Kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu.
- (3) Setiap bendaharawan, instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan badan-badan lain, sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kelalaian atau kelambatan penyetoran penerimaan negara ke rekening Kas Negara diperhitungkan dengan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran pada departemen/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya:
 - a. lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 20;
 - b. atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.

BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN RUTIN

Pasal 22

Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan pengeluaran rutin di lingkungan departemen/ lembaga yang dipimpinnya.

Pasal 23

- (1) Untuk pelaksanaan pengeluaran rutin, departemen/lembaga membuat DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO sesuai dengan contoh dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO setelah dibahas Departemen Keuangan dengan departemen/ lembaga, ditandatangani oleh :
 - a. Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk DIK yang dibuat di Pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk DIK yang dibuat di daerah.
- (3) DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran rutin setelah mendapat pengesahan dari :
 - a. Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIK yang dibuat di Pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIK yang dibuat di daerah.
- (4) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan kepada :
 - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - b. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
 - c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - d. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN);
 - e. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA) Direktorat Jenderal Anggaran;
 - f. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan

- g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
- (5) Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan DIK yang telah disahkan kepada :
 - a. Direktorat Jenderal/unit eselon I dan kantor/satuan kerja; dan
 - b. Inspektorat Jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga.
- (6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan DIK yang telah disahkan kepada :
 - a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
 - b. Direktur Jenderal Anggaran;
 - c. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran;
 - d. Kepala kantor wilayah/perwakilan departemen/lembaga yang bersangkutan;
 - e. Kepala Perwakilan Badan Perbendaharaan dan Kas Negara (BPKP);
 - f. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan
 - h. Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kepala KAR);

Pasal 24

- (1) Berdasarkan DIK yang telah disahkan disusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh :
 - a. Pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk pada Departemen/ Lembaga/instansi/kantor/satuan kerja untuk DIK yang dibuat di Pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga atau pejabat yang ditunjuk untuk DIK yang dibuat di daerah.
- (2) Departemen/lembaga menyampaikan juklak DIK yang dibuat di pusat kepada kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan juklak DIK yang dibuat di daerah kepada kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan bendaharawan rutin untuk DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat.
- (2) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga, atas nama menteri/ pimpinan lembaga menetapkan bendaharawan rutin untuk DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah.
- (3) Kepala kantor/satuan kerja bertanggung jawab, baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan kantor/satuan kerja yang dipimpinnya sebagaimana tersebut dalam DIK yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Perubahan/pergeseran biaya dalam satu program dalam satu dan atau antar DIK instansi pusat departemen/lembaga diputuskan oleh Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan usulan Sekretaris Jenderal atau pejabat eselon I yang ditunjuk.
- (2) Perubahan/pergeseran biaya dalam satu program dalam satu dan atau antar-DIK instansi vertikal departemen/lembaga diputuskan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan usulan :
 - a. Kepala kantor/satuan kerja bersangkutan apabila meliputi satu kantor/satuan kerja;
 - b. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/direktorat jenderal yang bersangkutan apabila meliputi lebih dari satu kantor/satuan kerja.
- (3) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan keputusan perubahan/pergeseran DIK kepada :
 - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - b. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - c. Kepala Badan Akuntansi Keuangan (BAKUN);
 - d. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran;

- e. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/direktorat jenderal yang bersangkutan;
 - f. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan
 - g. Kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
- (4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan keputusan perubahan/ pergeseran DIK kepada :
- a. Direktur Jenderal Anggaran;
 - b. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran;
 - c. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - d. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - e. Kepala kantor wilayah departemen/lembaga/direktorat jenderal yang bersangkutan;
 - f. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);
 - g. Kepala Kantor akuntansi Regional (Kantor KAR); dan
 - h. Kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Perubahan/pergeseran biaya antar program dalam satu subsektor dan atau dalam satu atau antar DIK kantor/satuan kerja tingkat pusat departemen/lembaga diputuskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan departemen/lembaga yang bersangkutan.
- (2) Keputusan terhadap usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterima usul tersebut beserta bahan-bahannya secara lengkap.
- (3) Perubahan/pergeseran biaya tidak dapat dilakukan dari :
 - a. Biaya untuk gaji dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam Belanja Pegawai;
 - b. Belanja pegawai ke belanja non pegawai;
 - c. Dana yang disediakan untuk pengeluaran rutin Perwakilan Republik Indonesia termasuk perwakilan departemen/lembaga di luar negeri untuk keperluan pembiayaan kegiatan kantor/ satuan kerja di dalam negeri.
- (4) Peninjauan kembali ketentuan dalam ayat (3) dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 28

- (1) Departemen/lembaga pada tiap awal tahun anggaran, menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) bagi tiap unit organisasi sampai pada tiap kantor/satuan kerja dan menyampaikan formasi tersebut kepada menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya tahun anggaran.
- (2) Formasi tersebut disahkan oleh menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan dan dalam hal menyangkut formasi pegawai di luar negeri, setelah mendengar pula pertimbangan Menteri Luar Negeri.
- (3) Formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan sebagai bahan perencanaan pengeluaran rutin paling lambat 4 (empat) bulan setelah berlakunya tahun anggaran.
- (4) Pengadaan pegawai hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan prioritas kepada :
 - a. pegawai pelimpahan dari departemen/lembaga yang kelebihan pegawai;
 - b. siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya;
 - c. pegawai tidak tetap (PTT) yang telah menyelesaikan masa baktinya dengan baik.
- (5) Pengadaan pegawai dalam batas formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kenaikan pangkat pegawai dalam batas formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan kenaikan pangkat sampai dengan golongan IV/a

dilaksanakan setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

- (7) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya tahun anggaran menteri/pimpinan lembaga telah menetapkan/menetapkan kembali pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan kepegawaian.
- (8) Salinan surat keputusan penetapan/penetapan kembali sebagai-mana dimaksud pada ayat (7) beserta contoh (spesimen) tanda tangan pejabat yang diberi wewenang segera dikirimkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, dan dalam hal tidak ada perubahan, penetapan kembali pejabat tersebut dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Menteri/pimpinan Lembaga yang bersangkutan.
- (9) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada daerah, perusahaan atau badan yang anggarannya tidak dibiayai atau sebagian dibiayai dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, menjadi beban pemerintah daerah/perusahaan/badan bersangkutan.
- (10) Perbantuan pegawai negeri sipil untuk tugas-tugas di luar pemerintahan dengan membebani anggaran belanja negara tidak diperkenankan, kecuali dengan izin menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan yang sekaligus menetapkan batas lamanya perbantuan tersebut.
- (11) Selama perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), formasi bagi pegawai tersebut tidak boleh diisi, dan setelah perbantuan berakhir, pegawai yang bersangkutan ditempatkan kembali pada departemen/lembaga asalnya.
- (12) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) hanya diperkenankan melakukan pembayaran upah pegawai harian/tenaga honorer, apabila untuk keperluan tersebut telah tersedia dananya dalam DIK/SKO bersangkutan.
- (13) Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah.
- (14) Penghasilan pegawai yang ditempatkan di luar negeri diatur dengan Keputusan Presiden.
- (15) Penghasilan sebagaimana pada ayat (12), (13), dan (14) di atas tidak diperkenankan pemotongan untuk keperluan apapun kecuali atas persetujuan pejabat/pegawai/penerima pensiun yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Kenaikan gaji berkala dilakukan dengan penerbitan surat pemberitahuan oleh kepala kantor/satuan kerja setempat atas nama pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan kenaikan gaji berkala tidak dapat berlaku surut lebih dari 2 (dua) tahun.
- (3) Penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7).

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia/penerima pensiun beserta keluarganya diberikan tunjangan beras dalam bentuk uang.
- (2) Tunjangan beras untuk keluarga tidak diberikan rangkap.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Keuangan atas usul menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan.
- (4) Menteri Keuangan menetapkan harga beras sebagai dasar pemberian tunjangan pangan dalam bentuk uang dan mengatur lebih lanjut pelaksanaannya.

Pasal 31

- (1) Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak dibatasi untuk 2 (dua) orang anak.
- (2) Dalam hal pegawai/pensiunan pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak dan tunjangan beras untuk lebih dari 2 (dua) orang anak, kepadanya tetap diberikan tunjangan untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut.

- (3) Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat diganti, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari 2 (dua).

Pasal 32

Pelaksanaan belanja barang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan yang direncanakan, dan harus dilengkapi dengan:
 - a. penjelasan mengenai urgensi/alasan perjalanan dan rincian programnya dengan menyertakan undangan, konfirmasi, dan dokumen yang berkaitan;
 - b. izin tertulis dari instansi bersangkutan apabila seorang pejabat diajukan instansi lain;
 - c. pernyataan atas biaya anggaran instansi mana perjalanan dinas tersebut akan dibebankan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. perjalanan dinas pegawai yang ditempatkan di luar negeri dan dipanggil kembali dari luar negeri;
 - b. perjalanan dinas pegawai antar tempat di luar negeri.
- (5) Izin perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah wewenang Menteri Luar Negeri serta Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, dan diberikan apabila pembiayaan untuk keperluan tersebut telah tersedia dalam DIK bersangkutan.
- (6) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan mengutamakan perusahaan penerbangan nasional atau perusahaan pengangkutan nasional lainnya.
- (7) Pegawai negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam daerah jabatannya, diberikan tunjangan perjalanan tetap.
- (8) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam 1 (satu) jumlah (lumpsum) kepada pejabat/pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas.
- (9) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 34

- (1) Pegawai yang dipindahkan dapat diberikan uang pesangon kecuali di tempat yang baru mendapat perumahan.
- (2) Pegawai yang dipindahkan/ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebelum mendapatkan perumahan diizinkan tinggal di hotel, tidak termasuk makan, untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian uang pesangon pindah.

Pasal 35

- (1) Pembukaan dan atau peningkatan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Presiden.
- (2) Pembukaan perwakilan departemen/lembaga di luar negeri hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri yang berwenang dalam bidang pendayagunaan aparatur negara, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan.

Pasal 36

- (1) Setiap perubahan/penyempurnaan organisasi dan atau pembentukan kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/ lembaga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis menteri yang berwenang di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Biaya sehubungan dengan pelaksanaan perubahan/ penyempurnaan organisasi departemen/lembaga dan atau pembentukan kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/lembaga yang mengakibatkan pergeseran anggaran/revisi dari departemen/ lembaga tersebut, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

BAB IV PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN

Pasal 37

- (1) Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan pengeluaran pembangunan di lingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya.
- (2) Untuk melaksanakan program pembangunan yang bersifat lintas sektor/departemen/lembaga ditunjuk koordinator diantara departemen/lembaga yang bersangkutan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 38

- (1) Untuk pelaksanaan pengeluaran pembangunan, departemen/ lembaga/instansi vertikal/pemerintah daerah membuat DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO sesuai dengan contoh dan petunjuk teknis yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- (2) DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO setelah dibahas Departemen Keuangan dengan departemen/ lembaga/ instansi vertikal/dinas propinsi, ditandatangani oleh :
 - a. Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk yang dibuat di pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk yang dibuat di daerah.
- (3) DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran pembangunan setelah mendapat pengesahan dari :
 - a. Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIP yang dibuat di pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIP yang dibuat di daerah.
- (4) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO dan dibuat di pusat dan telah disahkan kepada :
 - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - b. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
 - d. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - e. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN);
 - f. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran;
 - g. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
 - h. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan
 - i. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
- (5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah kepada :
 - a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;

- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
 - c. Direktur Jenderal Anggaran;
 - d. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran;
 - e. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - f. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);
 - h. Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kantor KAR); dan
 - i. Pemimpin proyek yang bersangkutan;
- (6) Departemen/lembaga menyampaikan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat dan di daerah yang telah disahkan kepada :
- a. Direktorat Jenderal/unit eselon I proyek yang bersangkutan;
 - b. Inspektorat Jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga;
 - c. Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan disusun petunjuk operasional (PO) oleh :
- a. Pejabat eselon I atau pejabat lain dibawahnya yang ditunjuk pada departemen/ lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan untuk DIP yang dibuat di pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk membawahkan proyek untuk DIP yang dibuat di daerah.
- (2) Departemen/lembaga menyampaikan PO proyek-proyek yang dibuat di pusat kepada :
- a. Direktur Jenderal Anggaran; dan
 - b. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
- (3) Kepala kantor wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan PO proyek-proyek yang dibuat di daerah kepada :
- a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan
 - c. Pemimpin proyek yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan pemimpin dan bendaharawan proyek untuk DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat.
- (2) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga, menetapkan pemimpin proyek dan bendaharawan proyek untuk DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah.
- (3) Bila dipandang perlu pemimpin proyek dan bendaharawan proyek dapat dibantu oleh pemimpin bagian proyek dan bendaharawan bagian proyek sepanjang lokasi proyek tersebar di beberapa kabupaten/kota.
- (4) Pejabat eselon I dan eselon II serta Kepala Kantor/Dinas/ Desa/ Satuan kerja tidak diperkenankan ditunjuk sebagai pemimpin proyek/bagian proyek dan atau bendaharawan.
- (5) Pemimpin dan bendaharawan proyek berkedudukan di lokasi proyek atau di ibukota kabupaten/kota terdekat.

Pasal 41

Pemimpin proyek/bagian proyek bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.

Pasal 42

- (1) Kepada petugas proyek diberikan honorarium.
- (2) Petugas proyek yang mengelola beberapa proyek hanya berhak mendapat honorarium dari 1 (satu) proyek.
- (3) Besarnya honorarium petugas proyek ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Biaya perjalanan dinas dan uang lembur untuk kepentingan proyek diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Perubahan/pergeseran biaya dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO diputuskan oleh:
 - a. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan usulan dari menteri/ pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk, untuk yang dibuat di pusat.
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/ gubernur atau pejabat yang ditunjuk, untuk yang dibuat di daerah.
- (2) Pergeseran biaya tidak dapat dilakukan :
 - a. dari belanja modal ke belanja penunjang;
 - b. dari belanja modal fisik ke belanja modal non fisik.
- (3) Pengecualian ketentuan dalam ayat (2) harus seijin Menteri Keuangan.
- (4) Keputusan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat disampaikan kepada :
 - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - b. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
 - d. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - e. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN);
 - f. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran;
 - g. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
 - h. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan
 - i. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
- (5) Keputusan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah disampaikan kepada :
 - a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
 - c. Direktur Jenderal Anggaran;
 - d. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran;
 - e. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - f. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);
 - h. Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kantor KAR); dan
 - i. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
- (6) Departemen/lembaga menyampaikan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang disamakan yang dibuat di pusat dan daerah yang telah disahkan kepada :
 - a. Direktur Jenderal/unit eselon I proyek yang bersangkutan;
 - b. Inspektorat jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga;
 - c. Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan revisi DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan disusun PO oleh :
 - a. pejabat eselon I/pejabat lain dibawahnya yang ditunjuk pada departemen/lembaga yang membawahkan proyek bersangkutan untuk DIP yang dibuat di pusat;

- b. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk proyek yang direvisi di daerah.
- (2) Departemen/lembaga menyampaikan revisi PO proyek-proyek yang direvisi di pusat kepada :
 - a. Direktur Jenderal Anggaran; dan
 - b. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan revisi PO proyek-proyek yang direvisi di daerah kepada :
 - a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan
 - c. Pemimpin proyek yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Dalam pengalokasian dana pembangunan agar diutamakan penyediaan dana pendamping bagi proyek yang sebagian dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri.
- (2) Dana pinjaman/hibah luar negeri dan dana pendamping termasuk uang muka harus dicantumkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- (3) Proyek yang dibiayai dengan dana kredit ekspor dapat dilaksanakan setelah tersedia uang muka bagi proyek dimaksud.
- (4) Naskah perjanjian luar negeri untuk kredit ekspor baru dapat ditandatangani apabila uang muka yang dibutuhkan telah tersedia.

Pasal 46

- (1) Sisa pekerjaan berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, ditampung dalam DIP tahun anggaran berikutnya atas beban bagian anggaran departemen/ lembaga bersangkutan.
- (2) Dalam hal sumber pembiayaan berasal dari bantuan luar negeri, sisa pekerjaan berdasarkan SPK dan atau surat perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari sisa dana bantuan luar negeri yang bersangkutan.

Pasal 47

Dalam hal target/sasaran proyek telah tercapai, sisa alokasi dana proyek yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri tidak dapat dipergunakan lagi.

Pasal 48

- (1) Pemimpin proyek menyerahkan proyek yang telah selesai dan seluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk dengan berita acara penyerahan, yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat.
- (2) Dalam pelaksanaan dekonsentrasi pemimpin proyek menyerahkan proyek atau hasil pekerjaan tersebut dan seluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga melalui gubernur dengan berita acara penyerahan, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pembantuan pemimpin proyek menyerahkan proyek atau hasil pekerjaan tersebut dan seluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga melalui gubernur/bupati/ walikota/kepala desa dengan berita acara penyerahan, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
- (4) Menteri/pimpinan lembaga menentukan status proyek yang telah selesai berikut kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dalam lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal hasil proyek tersebut pada ayat (4) akan diserahkan pemanfaatannya kepada pihak lain terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (6) Pembiayaan pengelolaan hasil proyek diatur sebagai berikut :

- a. Departemen/lembaga wajib mengatur penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara untuk hasil proyek yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Pemerintah daerah/desa wajib mengatur penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk hasil proyek yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. BUMN/BUMD/badan/instansi lainnya wajib mengatur penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan melalui anggaran belanja BUMN/BUMD/badan/instansi lainnya masing-masing untuk hasil proyek yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 49

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota mengumumkan kepada masyarakat proyek-proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah masing-masing melalui media cetak setempat dan atau melalui media elektronik.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota dibantu oleh masing-masing pemimpin proyek memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada dunia usaha melalui asosiasi perusahaan di daerahnya masing-masing.

BAB V PEDOMAN PELAKSANAAN DANA PERIMBANGAN

Pasal 50

- (1) Dana perimbangan bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (2) Dana perimbangan terdiri dari :
 - a. Dana bagi hasil;
 - b. Dana alokasi umum; dan
 - c. Dana alokasi khusus.

Pasal 51

- (1) Pembagian dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) untuk masing-masing daerah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penyaluran dana perimbangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana perimbangan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 52

- (1) Untuk keperluan penyaluran dana perimbangan Menteri Keuangan menerbitkan SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- (2) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO kepada:
 - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - b. Gubernur/Bupati/Walikota;
 - c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD);
 - d. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN);
 - e. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - f. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran;
 - g. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan
 - h. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

Pasal 53

- (1) Dana perimbangan dapat diperhitungkan langsung untuk disetor ke Rekening Kas Negara dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemerintah pusat.
- (2) Tata cara perhitungan, pemotongan dan penyetoran sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

BAB VI PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DEFISIT

Pasal 54

- (1) Pembiayaan defisit diperoleh dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri bersih.
- (2) Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non perbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan obligasi dalam negeri, penjualan aset pemerintah dalam rangka program restrukturisasi dan sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri tahun yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan pinjaman luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Pusat dapat menerus-pinjamkan pinjaman luar negeri kepada pemerintah daerah atau BUMN.
- (3) Tata cara penerusan pinjaman luar negeri kepada pemerintah daerah atau BUMN diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
- (4) Tata cara penyaluran dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri diatur oleh Menteri Keuangan.

BAB VII PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 56

- (1) Penyaluran pengeluaran rutin dan pembangunan di lingkungan Departemen Pertahanan dan Kepolisian RI melalui rekening kas negara pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
- (2) Tatacara penerimaan dan pengeluaran baik rutin maupun pembangunan Departemen Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia diatur bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pertahanan atau Kepala Kepolisian RI.

BAB VIII PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 57

- (1) Kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/bagian proyek wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan penatausahaan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada kepala instansi vertikal atasannya.
- (2) Disamping pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek dan bendaharawan untuk kegiatan yang bersifat fisik wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. keadaan/perkembangan fisik kegiatan/proyek;

- b. perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya;
 - c. penggunaan dana bagi pengadaan barang/jasa;
 - d. akumulasi pengeluaran untuk setiap bangunan dalam pengerjaan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah/instansi vertikal di daerah wajib membuat laporan keuangan sebagai rekapitulasi pelaksanaan anggaran dari kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek dalam wilayah kerjanya, kepada pejabat eselon I yang bersangkutan.

Pasal 58

Pejabat eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) pada departemen/lembaga wajib:

- a. Menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan menyelenggarakan penatausahaan barang serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya;
- b. Membuat laporan keuangan gabungan yang meliputi kantor unit eselon I yang bersangkutan dan kantor-kantor vertikal di lingkungannya kepada menteri/pimpinan lembaga atasannya c.q. Sekretaris Jenderal/pejabat yang setingkat.

Pasal 59

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi triwulanan penggunaan dana perimbangan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat.

Pasal 60

- (1) Menteri/pimpinan lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan dana pada bagian anggaran yang dikuasainya berupa laporan realisasi anggaran dan neraca departemen/lembaga bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala satuan kerja yang menggunakan dana bagian anggaran yang dikuasai Menteri Keuangan wajib menyampaikan pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala BAKUN.

Pasal 61

Tata cara pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, 58, 59, dan 60 diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), departemen/lembaga wajib melakukan penatausahaan piutang negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Tata cara pelaksanaan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 63

Menteri Keuangan menyelenggarakan penatausahaan utang-piutang negara yang timbul dalam rangka investasi dan penyertaan modal negara pada BUMN dan badan-badan lainnya.

Pasal 64

Bank Indonesia atau bank pemerintah yang ditunjuk sebagai Bank Tunggal dan Bank Operasional wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala BAKUN :

- a. Rekening koran Bendahara Umum Negara (BUN) disertai nota debit dan kredit yang bersangkutan setiap hari;
- b. Rekening koran Direktur Jenderal Anggaran setiap minggu disertai nota debit dan kredit yang bersangkutan setiap hari;

- c. Rekening koran untuk semua Rekening Khusus disertai nota debit dan nota kredit setiap minggu;
- d. Tembusan rekening koran lainnya milik pemerintah setiap minggu.

Pasal 65

Menteri Keuangan menyiapkan perhitungan anggaran negara berdasarkan laporan keuangan departemen/ lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Pasal 66

- (1) Pemimpin proyek di departemen/ lembaga menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan.
- (2) Pemimpin proyek pelaksanaan dekonsentrasi menyampaikan laporan bulanan kepada gubernur dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan.
- (3) Pemimpin proyek pelaksanaan tugas pembantuan menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan proyek kepada gubernur/bupati/ walikota selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan.
- (4) Gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan rangkuman laporan konsolidasi triwulanan mengenai proyek dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayahnya kepada menteri/pimpinan lembaga dengan tembusan kepada Kepala Bappenas dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan.
- (5) Menteri/pimpinan lembaga membuat rangkuman laporan konsolidasi triwulanan mengenai seluruh proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (6) Perkembangan pelaksanaan anggaran dan program pembangunan dilaporkan secara semesteran kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.
- (7) Ketentuan mengenai sistem pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.

Pasal 67

Setiap pegawai negeri karena kelalaian atau kesengajaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 68

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran rutin dilakukan sebagai berikut :

- a. Atasan kepala kantor/satuan kerja menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh kepala kantor satuan kerja dalam lingkungannya;
- b. Atasan langsung bendaharawan melakukan pemeriksaan kas bendaharawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- c. Kepala biro keuangan departemen/ lembaga mengadakan verifikasi terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) mengenai kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/ lembaga bersangkutan.

Pasal 69

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pembangunan dilakukan sebagai berikut :

- a. Atasan langsung pemimpin proyek/bagian proyek menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemimpin proyek/bagian proyek yang bersangkutan;
- b. Pemimpin proyek/bagian proyek mengadakan pemeriksaan kas bendaharawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- c. Kepala biro keuangan departemen/lembaga melakukan verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) mengenai proyek dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan.

Pasal 70

- (1) Inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran negara yang dilakukan oleh kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil pemeriksaan inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BPKP.

Pasal 71

BPKP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

Inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan lembaga, Kepala BPKP, unit pengawasan daerah/desa wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 73

Pemerintah dapat menunjuk lembaga swadaya masyarakat/badan non pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek/kegiatan tertentu.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 75

Selama petunjuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini belum ditetapkan, petunjuk pelaksanaan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, tetap berlaku.

Pasal 76

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

PENJELASAN
ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA

UMUM

Sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang.

Agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien maka ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimaksud dengan Keputusan Presiden.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pendapatan negara termasuk didalamnya yang berasal dari sumber daya alam dan jasa.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah membantu dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan persetujuan adalah penetapan tarif dan izin pemanfaatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Yang dimaksud dengan barang bergerak yang bernilai ekonomis tinggi adalah barang bergerak dengan nilai perolehan per satuan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau barang bergerak dengan nilai perolehan per paket usulan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud produksi dalam negeri adalah produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud standardisasi adalah penggunaan satuan harga umum termasuk "Billing Rate".

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Pajak adalah Pajak Pusat.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Departemen Keuangan adalah Direktorat Jenderal Anggaran untuk pembahasan DIK di Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran untuk pembahasan DIK di daerah (propinsi)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila suami istri kedua-duanya bekerja sebagai pegawai negeri, tunjangan beras diberikan untuk masing-masing suami istri menurut haknya sebagai pegawai negeri. Disamping itu, tunjangan beras juga diberikan kepada istri atau suami dan anak-anak sebagai anggota keluarga yang dibebankan kepada salah satu pihak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan belanja barang adalah belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan subsidi.

Pasal 33

Ayat (1)

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Perjalanan dinas untuk menghadiri seminar, lokakarya, simposium, konferensi dan melaksanakan peninjauan, studi perbandingan serta inspeksi harus dibatasi dengan ketat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Instansi vertikal dan pemerintah daerah propinsi membuat DIP sebagai pelaksana dekonsentrasi. Sedangkan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, kota, dan desa sebagai pelaksana tugas pembantuan, DIP-nya dibuat di pusat oleh departemen/lembaga.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Departemen Keuangan adalah Direktorat Jenderal Anggaran untuk pembahasan DIP di Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran untuk pembahasan DIP di daerah (propinsi).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan pemimpin bagian proyek dan bendaharawan bagian proyek mengacu pada Pasal 40 ayat (1) dan (2).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan harus selesai satu tahun anggaran. Apabila suatu kontrak pekerjaan direncanakan akan melewati satu tahun anggaran harus dengan ijin Menteri Keuangan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan proyek yang telah selesai adalah sebagian atau seluruh pekerjaan yang telah dapat dimanfaatkan dan memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Menteri Dalam Negeri adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2002.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Kepala BAKUN.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan adalah Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Yang dimaksud Menteri Keuangan adalah Kepala BAKUN.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Laporan konsolidasi triwulanan adalah laporan triwulanan yang disusun oleh gubernur/walikota/bupati mengenai pelaksanaan seluruh proyek pembangunan yang ada di daerahnya, yang dirinci menurut sektor, sub sektor dan program.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas